

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan /atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak

Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan aspek hukum kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945,¹ dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak.³ Oleh karena itu tindakan orang terhadap anak dalam kandungan seperti tidak memberikan asupan gizi dapat dikategorikan dalam kekerasan dan lebih khusus yang dikualifikasikan sebagai tindakan penelantaran terhadap anak.

¹Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

²Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hal.1

³Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal 117

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya.

Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.

⁴Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.12

Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun psikis dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Undang-undang pokok KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁵

Permasalahan yang muncul dalam pemberitaan yakni kekerasan yang dialami anak akibat perlakuan dari orang tua. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjadi terhambat akibat perilaku orang tua yang salah dalam mendidik anak. Perlindungan hukum yang selama ini, dirasa kurang dalam melindungi hak-hak anak membuat kasus KDRT sering terjadi.

⁵Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika., h. 1

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39 tahun 1999) dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 2002) dan terakhir dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2004). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“STUDI YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

B. Pembatasan Masalah

Dalam setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul, dan waktu. Pembatasan masalah juga dilakukan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penelitian dan pembahasan masalah.

Sehingga dengan adanya pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Perumusan Masalah

Dalam pencapaian tujuan penelitian, maka terlebih dahulu akan dilakukan perumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana profile peraturan perlindungan anak ?
2. Mengapa anak perlu mendapatkan perlindungan hukum ?
3. Bagaimanakah peran aparat penegak hukum, lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak korban KDRT menurut UU perlindungan anak dan UU PKDRT?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengkaji dan menjelaskan profile peraturan perlindungan anak.
 - b. Mengkaji dan mendeskripsikan anak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

- c. Mengkaji dan menganalisis peran aparat penegak hukum, lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban KDRT menurut UU perlindungan anak dan UU PKDRT.

2. Tujuan Subyektif

- a. Menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana
- b. Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.
- c. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya hukum acara pidana dengan mempraktekannya di lapangan.
- b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenai perlindungan anak yang

berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
- b. Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Berfikir

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary* Barker, mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).⁷

Ketentuan Pasal 351 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hukuman selama 2 tahun sampai dengan 12 tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah. Jadi, tidak adanya hubungan minimum mengakibatkan putusan jadi ringan.

Sedangkan Pasal 465 KUHP tentang penyanderaan dan Pasal 470 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang dianggap belum cukup

⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung : Citra Umbara, 2003, hal. 35

⁷ Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, hal. 47

untuk mewadahi kekerasan psikis yang sering dialami korban kekerasan dalam rumah tangga karena kekerasan psikis tidak hanya meliputi dua hal tersebut, tetapi juga semua perbuatan ataupun ucapan yang berakibat secara psikis pada seseorang. Misalnya, kekuatan, menjadi tidak berdaya, tidak percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan depresi.

Berikut ini merupakan contoh bentuk perbuatan (tindak pidana) kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam KUHP ada beberapa tindak pidana, bahkan ada yang secara eksplisit disebutkan sebagai kekerasan terhadap anak, yaitu (1) Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); (2) Kejahatan yang melanggar kesusilaan, seperti menawarkan, memberikan, untuk terus menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa (Pasal 283), bersetubuh dengan wanita yang diketahui belum berumur lima belas tahun di luar perkawinan (Pasal 287), melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum berumur lima belas tahun (Pasal 290), melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya, yang belum dewasa (Pasal 294), menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya, yang belum dewasa dengan

orang lain (Pasal 295), melakukan perdagangan anak (Pasal 297), membikin mabuk terhadap anak (Pasal 300), memberi atau menyerahkan seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya kepada orang lain untuk melakukan pengemis atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang dapat merusak kesehatannya (Pasal 301); (3) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang lain (Pasal 330), menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331), melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu (Pasal 332); (4) Kejahatan terhadap nyawa, seperti merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 dan 342); (5) Kejahatan penganiayaan terhadap anaknya sendiri (Pasal 351-356).

Maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, dimana undang-undang ini memuat berbagai aspek dan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan lebih mengkhususkan kedalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma

atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸

Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mendiskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif

⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, hal: 58.

⁹*Ibid*, hal. 10

dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya di perpustakaan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau bahan hukum primer merupakan bahan hukum autorative. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

9) PP No.2 tahun 1988

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁰

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

c. Data Tersier

Data tersier dalam hal ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya: Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁰ Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal:65.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data. Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.¹¹

7. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

¹¹ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, hal. 65-66

¹² *Ibid*, hal. 82

H. Sistematika Skripsi

Agar dapat memahami arah dan ruang lingkup dari penulisan hukum ini, maka perlu peneliti sajikan sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut :

Pendahuluan: Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, rumusan masalah membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian yaitu meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi: Pengertian perlindungan anak, terdiri dari: pengertian anak, persyaratan pelaksanaan perlindungan terhadap anak penyebab dan akibat kekerasan terhadap anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, hak-hak dan kewajiban anak, hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tinjauan kekerasan dalam rumah tangga, terdiri dari

:pengertian kekerasan dalam rumah tangga , hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perlindungan hukum, dan ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai profile peraturan perlindungan anak, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dan upaya aparat penegak hukum, lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban KDRT.

Penutup: Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai kesimpulan secara singkat dan jelas dalam menjawab rumusan masalah, juga menguraikan mengenai saran yang merupakan alternative solusi atas masalah yang ditemukan.